

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1. Profil DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang.

2.1.1. Sejarah dan Latar Belakang

Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang merupakan struktur organisasi partai di tingkat kabupaten yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan Dewan Pimpinan Daerah DPD Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan DPC ini tidak terlepas dari sejarah lahirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai politik nasional yang secara resmi berdiri pada tahun 1999 di bawah kepemimpinan Megawati Sukarnoputri, pasca reformasi 1998.

Secara historis, basis massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Magelang tergolong kuat, terutama karena karakter sosial masyarakat yang dekat dengan nilai-nilai nasionalisme, gotong royong, serta tradisi politik kerakyatan. Hal ini membuat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang berkembang sebagai salah satu kekuatan politik dominan di wilayah tersebut, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah.

Pembentukan dan penguatan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang dilakukan melalui konsolidasi

struktur hingga tingkat kecamatan PAC, desa/kelurahan (ranting), dan anak ranting. Tujuan utama pendirian DPC adalah mengoordinasikan kerja politik kader, melakukan pendidikan politik masyarakat, menjaring aspirasi rakyat, serta mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan wong cilik sesuai ideologi partai.¹⁶ Dalam perkembangannya, DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang tidak hanya berfungsi sebagai mesin elektoral, tetapi juga sebagai pusat pengkaderan dan pengorganisasian politik lokal. DPC berperan penting dalam rekrutmen calon legislatif, penguatan loyalitas kader, serta implementasi kebijakan internal partai termasuk strategi pemenangan pemilu berbasis wilayah dan pengawasan kerja politik kader di lapangan.

Selain itu, DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kabupaten Magelang juga berperan sebagai mediator antara kepentingan masyarakat lokal dengan kebijakan partai di tingkat yang lebih tinggi. Melalui kegiatan reses anggota legislatif, forum temu kader, serta agenda turun ke basis (turba), DPC secara aktif menghimpun aspirasi warga yang kemudian dirumuskan menjadi agenda perjuangan politik partai. Pola kerja ini menunjukkan bahwa DPC tidak hanya menjalankan fungsi

¹⁶ AULIA NUR AENI K. (2022). Rekrutmen Politik Partai Dalam Penentuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Magelang Pada Pemilu 2019. Universitas Gadjah Mada.

struktural semata, tetapi juga fungsi representatif, yakni memastikan suara rakyat terartikulasikan dalam proses pengambilan keputusan politik, baik di DPRD maupun dalam perumusan strategi pembangunan daerah.

2.1.2. Struktur Organisasi

Pelaksanaan Kinerja Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 13.03/KPTS-DPC/DPP/II/2026. Tanggal 05 Februari 2026 tentang Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang Masa Bakti 2025-2030.

Susunan organisasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang dapat dilihat dari bagan berikut:

Tabel 2. 1 Struktur Organisasi DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Grengseng Pamudi	Ketua
2	Sakir, S.Sos	Sekretaris
3	Muhammad Anas	Wakil Sekretaris Bidang Internal

4	Miftahudin	Wakil Sekertaris Bidang Program
5	Saryan Adiyanto, SE	Bendahara
6	Zaenal Mahfud	Wakil Bendahara
7	Supramana	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai
8	Gunawan	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif
9	Dwi Heru Sutopo	Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi
10	Sudarno	Wakil Ketua Bidang Keanggotaan, Organisasi, dan Sumber Daya
11	Ayuning Sekar Suci, B.Bus, MIB/MA	Wakil Ketua Bidang Politik dan Reformasi Sistem Hukum Nasional
12	Widodo	Wakil Ketua Bidang Pemerinitahan, Otonomi Daerah, Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi

13	Yosepha Sri Windaryatmi	Wakil Ketua Bidang Perekonomian, Kebudayaan dan Pendidikan
14	Hj. Endrianingsih Yunita H, SP	Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Perempuan dan Anak
15	Suyanti, SH	Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, Koperasi, UMKM
16	Eling Aneka Mala, S.Sos	Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial
17	R. Sumandah	Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
18	Sri Minjayati	Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
19	Henny Wardani	Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital
20	Jumat	Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Pangan, Kehutan dan

		Lingkungan Hidup dan Kelautan dan Perikanan
21	Muh. Heri Siswanto, SIP	Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi

2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam sistem demokrasi, partai politik memiliki peran strategis sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, serta pengatur konflik.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat, penciptaan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, serta sebagai sarana partisipasi politik warga negara.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Menjalankan keputusan, garis perjuangan, serta instruksi dari DPP dan DPD di wilayah kabupaten/kota.
2. Bertanggung jawab dalam proses rekrutmen, pendidikan politik, serta peningkatan kapasitas kader partai.
3. Menjaga soliditas internal serta memperluas basis dukungan masyarakat.
4. Berperan dalam merancang dan menjalankan strategi pemenangan pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah, serta pemilihan presiden di tingkat daerah.
5. Penghubung antara masyarakat dengan partai dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan rakyat.

2.2.Strategi Kemenangan PDI – Perjuangan Kabupaten Magelang “Kebijakan Komandante Stelsel”.

2.2.1. PP DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah No. 01 Tahun 2023.

Peraturan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 dibuat sebagai jawaban atas kebutuhan partai untuk menghadapi Pemilu 2024 yang persaingannya semakin ketat. Melalui peraturan ini, partai menegaskan pentingnya strategi pemenangan yang terarah, dilakukan secara gotong royong dan mengandalkan mesin partai sebagai kekuatan utama untuk menggerakkan pemilih. Tujuannya adalah agar seluruh struktur dan kader partai bergerak serempak,

dengan tugas yang jelas dan arah kerja yang sama. Peraturan tersebut juga menjadi dasar pelaksanaan Komandante Stelsel, yaitu sistem kerja politik yang membagi wilayah secara teratur dan berjenjang. Dalam sistem ini, setiap kader diberi tanggung jawab pada wilayah tertentu sebagai area utama penggalangan suara. Dengan cara ini, kegiatan kampanye tidak dilakukan secara bebas atau sendiri-sendiri, tetapi terorganisasi dari tingkat provinsi sampai ke tingkat paling bawah.

Melalui pengaturan ini, kemenangan pemilu tidak hanya bergantung pada kemampuan pribadi calon legislatif, tetapi juga pada kerja bersama seluruh struktur partai. Strategi elektoral terpimpin menjadi kerangka besarnya, sementara Komandante Stelsel berfungsi sebagai cara pelaksanaannya di lapangan. Keduanya saling melengkapi untuk memperkuat kerja kader, meningkatkan kinerja mesin partai, serta menjaga kekompakan internal. Secara sederhana, kebijakan ini menunjukkan upaya partai membangun sistem kemenangan yang rapi, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan kerja kolektif yang terarah, partai berharap dapat meningkatkan perolehan suara sekaligus menjaga soliditas kader hingga tingkat akar rumput.

Peraturan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang kemenangan pemilu anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan melalui strategi dan kebijakan pemenangan electoral terpimpin berbasis gotong royong bertumpu pada mesin partai menjadi langkah strategis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah untuk memenangkan kontestasi politik Pemilu Tahun 2024. Peraturan Partai ini memuat mengenai dasar-dasar pembentukan Kebijakan Komandante Stelsel, panduan pelaksanaan kampanye, pembagian wilayah ampunan dan larangan-larangan saat melakukan kampanye yang kemudian menjadi landasan bagi para calon legislatif.

Kampanye atau penjaringan suara berbasis gotong royong menjadi fokus utama dalam peraturan partai demokrasi Indonesia perjuangan provinsi jawa tengah ini dengan menguraikan langkah langkah kongkret untuk mengimplementasikan peraturan ini dengan dikoordinasikan oleh DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah dan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masing-masing Kabupaten/Kota.

Peraturan ini diharapkan dapat membawa dampak positif yang cukup signifikan terhadap hasil perolehan suara para calon legislatif internal Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah.¹⁷

¹⁷ Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023.

2.3. Pembagian Dapil dan Wilayah Ampuan

2.3.1. Pembagian Daerah Pemilihan Pemilu tahun 2024

Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Magelang dibagi menjadi enam daerah pemilihan (dapil) untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Magelang. Penetapan daerah pemilihan tersebut dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan prinsip kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, integralitas wilayah, kesinambungan, dan kohesivitas wilayah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penataan daerah pemilihan.

Pembagian daerah pemilihan tersebut menjadi sangat penting dalam penelitian ini karena Kebijakan Komandante Stelsel diterapkan melalui mekanisme pembagian wilayah ampuan kepada setiap calon legislatif berdasarkan wilayah daerah pemilihan masing-masing. Oleh karena itu, karakteristik setiap dapil menjadi dasar dalam pembagian tugas politik, strategi kampanye, serta koordinasi antarcalon legislatif di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang.

Pembagian enam daerah pemilihan tersebut menjadi dasar dalam proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Magelang pada Pemilu 2024. Setiap daerah pemilihan terdiri atas beberapa kecamatan yang memiliki karakteristik sosial, geografis, dan jumlah

pemilih yang berbeda sehingga memengaruhi strategi kampanye masing-masing calon legislatif.

Pada konteks penelitian ini, pembagian daerah pemilihan memiliki hubungan yang erat dengan implementasi Kebijakan Komandante Stelsel. Kebijakan tersebut mengatur pembagian wilayah ampunan kepada calon legislatif agar setiap caleg memiliki fokus wilayah kerja yang jelas, mengurangi persaingan antarkader dalam satu partai, serta mengoptimalkan perolehan suara partai di setiap daerah pemilihan. Dengan adanya pembagian wilayah berdasarkan dapil, koordinasi politik menjadi lebih terstruktur karena setiap calon legislatif memiliki tanggung jawab terhadap wilayah yang telah ditetapkan oleh partai.

Selain sebagai dasar administrasi penyelenggaraan pemilu, daerah pemilihan juga menjadi ruang implementasi kebijakan internal partai. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pembagian dapil sangat penting dalam menganalisis bagaimana Kebijakan Komandante Stelsel diterapkan di Kabupaten Magelang serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi strategi politik, hubungan antarkader, dan dinamika internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selama Pemilu 2024.

2.3.2. Pembagian Wilayah Ampuan Kebijakan Komandante Stelsel

Dalam pelaksanaan Kebijakan Komandante Stelsel pada Pemilu Tahun 2024, DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah menerapkan sistem pembagian wilayah ampuan kepada setiap calon legislatif. Wilayah ampuan merupakan wilayah kerja politik yang menjadi tanggung jawab masing-masing calon legislatif untuk melakukan konsolidasi organisasi, pembinaan kader, sosialisasi program partai, serta mobilisasi dukungan masyarakat selama tahapan pemilu. Sistem ini dirancang untuk mengurangi persaingan antarcalon legislatif dari partai yang sama dan meningkatkan efektivitas strategi pemenangan partai.

Di Kabupaten Magelang, pembagian wilayah ampuan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain:

1. wilayah daerah pemilihan (dapil);
2. sebaran desa dan kecamatan;
3. basis suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. domisili dan jaringan sosial calon legislatif;
5. potensi perolehan suara di setiap wilayah.

Melalui mekanisme tersebut, setiap calon legislatif memperoleh tanggung jawab politik pada wilayah tertentu sehingga kegiatan kampanye, pembinaan simpatisan, dan penggalangan suara dapat berjalan secara lebih terarah. Dengan adanya pembagian wilayah ampuan, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih aktivitas

politik antarcaleg dalam satu partai sehingga seluruh potensi suara dapat dimaksimalkan untuk kepentingan partai secara keseluruhan.

Pembagian wilayah ampunan tidak bersifat sebagai pembagian administratif pemerintahan, melainkan merupakan pembagian tugas internal organisasi partai yang ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan partai. Oleh karena itu, rincian pembagian wilayah tersebut merupakan dokumen internal organisasi dan tidak dipublikasikan secara terbuka. Dalam penelitian ini, informasi mengenai pembagian wilayah ampunan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magelang dan calon legislatif yang menjadi informan penelitian.